

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara kekuatan politik dan geografi. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan batas-batas negara mempengaruhi kebijakan politik dan hubungan internasional antara negara-negara. (Ramadhan, 2018).

Dalam konteks Cina, geopolitik telah menjadi faktor penting dalam memahami kebijakan dan ambisi negara tersebut. Misalnya, *Belt and Road Initiative* (BRI) Cina adalah proyek infrastruktur yang melibatkan pembangunan jalur koridor perdagangan darat dan jalur perdagangan maritim yang melintasi wilayah Eurasia dan perairan strategis dunia. BRI Cina memiliki tujuan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi geopolitik yang signifikan. Jika proyek ini berhasil, Cina dapat memperoleh keuntungan ekonomi dan juga mengubah konstelasi geopolitik dunia, yang berpotensi menjadikan Cina sebagai kekuatan utama dunia yang baru (Ramadhan, 2018).

Geopolitik juga dapat berhubungan dengan isu energi. Misalnya, strategi keamanan energi Cina dan peran perusahaan minyak nasional (NOC) Cina dalam geopolitik minyak di Asia Pasifik. Dalam konteks ini, Cina menggunakan pendekatan kapitalisme negara untuk mencapai keamanan energi dan memainkan peran penting dalam mengelola pasokan minyak di kawasan tersebut. (Asbanu, 2018)

Selain itu, geopolitik juga dapat mempengaruhi pembentukan konstelasi politik dan sejarah suatu wilayah. Sejarah penyerahan wilayah utara Borneo dari Kesultanan Brunei kepada Kesultanan Sulu,

misalnya, memiliki dampak penting dalam konteks geopolitik modern Sabah. Permainan kekuasaan dan interpretasi sejarah dapat mempengaruhi cara kita memahami dan membentuk geopolitik suatu wilayah (Joko, 2020)

Dalam rangka memahami geopolitik, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor geografis, politik, ekonomi, dan sejarah yang saling terkait. Geopolitik dapat mempengaruhi kebijakan negara, hubungan internasional, dan konstelasi politik suatu wilayah. Geopolitik mengacu pada studi tentang hubungan antara geografi, politik, dan hubungan internasional. Ini melibatkan analisis pengaruh faktor geografis, seperti lokasi, ukuran, iklim, topografi, dan sumber daya alam, pada keputusan politik dan strategis. (Elezi, 2014). Konsep dasar geopolitik meliputi (Höhn, 2011)

- a. Faktor Geografis: Geopolitik mempertimbangkan karakteristik fisik suatu wilayah, seperti lokasi, iklim, dan sumber dayanya, dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi keputusan politik dan strategis.
- b. Kekuasaan dan Pengaruh: Geopolitik mengkaji distribusi kekuasaan di antara negara-negara dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan mereka. Ini menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada kekuatan suatu negara, seperti kemampuan militer, kekuatan ekonomi, dan pengaruh diplomatik.
- c. Teritorialitas: Geopolitik berfokus pada kontrol dan kepemilikan wilayah. Ini mengeksplorasi bagaimana sengketa dan klaim teritorial dapat membentuk hubungan dan konflik internasional.
- d. Pertimbangan Strategis: Geopolitik melibatkan penilaian kepentingan strategis wilayah atau lokasi tertentu dan

bagaimana mereka dapat memengaruhi keputusan politik dan militer. Ini mengkaji pentingnya chokepoints, rute perdagangan, dan akses ke sumber daya dalam membentuk dinamika geopolitik.

- e. Dinamika Regional dan Global: Geopolitik menganalisis interaksi dan hubungan antar negara dalam wilayah tertentu dan dalam skala global. Ini mempertimbangkan aliansi, persaingan, dan kepentingan geopolitik yang membentuk politik internasional.

Geopolitik mengacu pada hubungan antara politik dan status teritorial dalam skala nasional dan internasional (Probotrianto, 2021). Dampak geopolitik terhadap hubungan internasional dapat dilihat dalam berbagai hal, antara lain: Persaingan sumber daya: Geopolitik dapat memengaruhi persaingan sumber daya, seperti minyak dan gas, yang dapat memengaruhi hubungan internasional (Asbanu, 2018); Keamanan nasional: Geopolitik juga dapat memengaruhi keamanan nasional, karena negara mungkin berusaha melindungi kepentingan dan wilayah mereka (Asbanu, 2018); Kebijakan luar negeri: Geopolitik dapat membentuk kebijakan luar negeri suatu negara, karena mempertimbangkan posisinya dalam hubungannya dengan negara dan wilayah lain (Daulay, 2017); Kerjasama ekonomi: Geopolitik juga dapat memengaruhi kerjasama ekonomi antar negara, karena mereka berupaya membangun kemitraan dan aliansi untuk saling menguntungkan (Pugu, 2022). Keseluruhan, geopolitik dapat memainkan peran penting dalam membentuk hubungan internasional, karena negara berusaha melindungi kepentingan mereka dan mempertahankan posisi mereka dalam tatanan global.

Pada Mei 2022, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengunjungi Asia. Kunjungan ini dilanjutkan dengan KTT ASEAN-AS di Washington, D.C. pada 12-13 Mei 2022. Presiden Joe Biden kemudian mengunjungi Korea Selatan pada 20-22 Mei dan menghadiri *Quad Summit* di Jepang pada 22 dan 23 Mei (Ryall, 2022). Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan kerjasama AS di kawasan Asia-Pasifik. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Joe Biden mengumumkan kerangka kerja baru untuk kerjasama ekonomi Indo-Pasifik yang disebut *Indo-Pacific Economic Framework* atau disebut juga IPEF (Puspaningrum, 2022). IPEF saat ini memiliki 13 anggota, termasuk Amerika Serikat, yang semuanya menyumbang 40% dari produk domestik bruto dunia. Anggotanya adalah Australia, Brunei Darussalam, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam (Bimo, 2022). Seluruh negara peserta IPEF juga merupakan mitra dagang strategis bagi Indonesia.

Partisipasi Indonesia di *Indo-Pacific Economic Framework/* IPEF pada Mei 2022 (House, 2022) adalah salah satu janji Indonesia dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden pada *ASEAN-US Special Summit 2022* (ASEAN, 2022) IPEF merupakan inisiatif Presiden AS Joe Biden dalam rangkaian kunjungannya ke Korea Selatan dan Jepang. Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi meluncurkan kerangka kerja itu sendiri *Indo-Pacific Economic Framework* atau IPEF pada 23 Mei 2022. (Williams, Rachel, & Mark, 2022). Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan yang hadir secara virtual dalam pertemuan tersebut. Negara peserta PEF adalah Amerika Serikat, Australia, Fiji, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru serta 7 (tujuh) negara ASEAN yaitu Brunei

Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam..



(Forces.net)

Gambar 1.1 Peta Kawasan Indo-Pasifik

Negara-negara besar ini berlomba-lomba menjalankan peran dan memperluas pengaruhnya di kawasan. Beberapa konsep kerjasama juga telah dikembangkan, seperti proyek *Belt and Road Initiative* Itu dimiliki oleh Cina dan akan menggunakan beberapa wilayah di kawasan itu karena Indo-Pasifik adalah jalur perdagangan utama Cina. *Free and Open Indo-Pacific* diprakarsai oleh Amerika Serikat. Menurut Amerika Serikat, *Belt and Road Initiative* (BRI) menjadi konsekuensi geopolitik akibat kebangkitan ekonomi internasional Cina, kemudian dalam prosesnya menjadi ancaman besar yang harus disikapi oleh strategi Indo-Pasifik AS (Liu, 2019). Jika dilihat dari sudut pandang Cina melihat Indo-Pasifik, negara ini memiliki motivasi tersendiri berupa kepentingan terutama terkait ekonomi. Di Laut Cina Timur dan Selatan, Cina melihat adanya upaya untuk mendapatkan kekuasaan atau kontrol yang digunakan untuk mempertahankan kepentingannya dan

juga untuk menegaskan dirinya sebagai kekuatan regional yang unggul (Jakobson & Medcalf, 2015).

Terdapat empat prinsip utama dalam 4 (empat) pilar kerjasama IPEF, yaitu: Pilar I (*Trade*) terkait dengan masalah *connected economy* mendorong penerapan standar dan peraturan yang lebih ketat *digital trade*, seperti *cross border data flows*. Di Pilar II (*Supply Chain*) berharap untuk mendorong *resilient economy* dengan menciptakan rantai pasokan yang dapat menahan gangguan tak terduga seperti pandemi COVID-19. Untuk Pilar III (*Clean economy*) dengan fokus pada komitmen dan proyek energi hijau. Sementara itu, terkait Pilar IV (*Fair*) dorongan *fair economy* gunakan perdagangan yang adil (*fair trade*), termasuk aturan tentang pemberantasan korupsi dan perpajakan yang efektif. Berdasarkan Deklarasi *Statement on Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity*. (House, 2022), Untuk pilar perdagangan, IPEF akan berupaya merumuskan ketentuan berkualitas tinggi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Ini juga mencakup tenaga kerja, lingkungan, ekonomi digital, pertanian, transparansi dan praktik pengaturan yang baik, persaingan, inklusivitas, fasilitasi perdagangan dan bantuan teknis serta pembangunan ekonomi.

Konteks politik internasional kontemporer saat ini menempatkan penekanan dan perhatian pada pembangunan berkelanjutan dan berkembangnya kesejahteraan (Leguey & Robert, 2017) (Lukman, 2021). Dalam konteks IPEF sebagai forum kolaboratif, Indonesia perlu melihat dan menentukan sejauh mana tujuan Indonesia akan dikejar untuk memenuhi kepentingan nasional dan penting untuk melihat dampak kebijakan Indonesia. IPEF di negara pemrakarsa (Amerika Serikat) serta di Indonesia dan negara peserta lainnya.

Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan IPEF sangat politis dan strategis karena merupakan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan kerjasama ekonomi antara Cina dan Amerika Serikat, mengingat terdapat beberapa kemitraan antara Indonesia dan Cina di berbagai sektor, yang tentunya membutuhkan untuk di konfirmasi internasional bahwa Indonesia merangkul dua negara besar tersebut (Stromseth, 2021) (Brands & Gavin, 2020). IPEF merupakan respon terhadap keadaan saat ini dimana semua negara harus bekerjasama untuk menciptakan keseimbangan, kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan keadilan di kawasan Indo-Pasifik. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2022)

Pada tahun 2014, Indonesia mulai mengorientasikan kebijakan luar negerinya pada kekuatan maritim melalui Pernyataan Visi Poros Maritim Global, yang pertama kali digagas oleh Presiden Joko Widodo. Visi tersebut semakin diperkuat dengan diplomasi maritim yang diusung oleh pemerintah Indonesia yang salah satunya diawali dengan pengenalan identitas Indonesia sebagai negara maritim yang tertuang dalam visi Kementerian Luar Negeri: “Terwujudnya Wibawa Diplomasi Guna Memperkuat Jati Diri Sebagai Negara Maritim Untuk Kepentingan Rakyat” (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

Terkait dengan kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, pada bulan Juni tahun 2019, para pemimpin ASEAN mengadopsi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang bertujuan untuk mempresentasikan suara kolektif mereka tentang wacana Indo-Pasifik yang muncul yang sebelumnya aktif dipromosikan oleh AS, India, Jepang dan Australia disebut juga dengan *The Quad (Quadrilateral Security Dialogue)* (Ha, 2021). AS tentu sangat menyambut dengan baik AOIP.

Tidak hanya itu, dalam upaya menciptakan kawasan yang lebih aman, AS berupaya meningkatkan kerjasama maritim dan menegakkan hukum dan standar internasional untuk menyelesaikan tantangan geopolitik, termasuk di Laut Cina Selatan (U.S. of Deffense, 2021). Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) adalah inisiatif yang diusulkan oleh Amerika Serikat untuk mempromosikan kerjasama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik (Hutabarat, 2022). Berikut adalah beberapa kemungkinan dampak IPEF di wilayah tersebut:

- Diplomasi: Indonesia telah menanggapi IPEF dengan mempertimbangkan kepentingan nasionalnya dan menerapkan kebijakan luar negeri yang menyeimbangkan hubungannya dengan Amerika Serikat dan Cina (Hutabarat, 2022) IPEF juga dapat mendorong negara-negara lain di kawasan ini untuk berkolaborasi dan bekerja menuju tujuan bersama.
- Pertumbuhan ekonomi: IPEF bertujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan pembangunan di kawasan, yang dapat mengarah pada peningkatan peluang perdagangan dan investasi (Hutabarat, 2022). Hal ini berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih baik bagi orang-orang di wilayah tersebut.
- Implikasi politik dan keamanan: IPEF merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas di kawasan, yang dapat memiliki implikasi politik dan keamanan (Hutabarat, 2022). Misalnya, persaingan antara Amerika Serikat dan Cina dapat menyebabkan peningkatan ketegangan dan persaingan di kawasan.
- Keseimbangan kekuatan: IPEF berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan di kawasan, karena negara-negara dapat

menyesuaikan diri dengan Amerika Serikat atau Cina berdasarkan kepentingan ekonomi mereka (Amalia, 2020). Hal ini dapat menyebabkan perubahan lanskap politik dan ekonomi kawasan.

Secara keseluruhan, dampak IPEF di kawasan Indo-Pasifik bersifat kompleks dan beragam. Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan kerjasama dan pembangunan ekonomi, hal itu juga dapat memiliki implikasi politik dan keamanan serta berpotensi menggeser perimbangan kekuatan di kawasan. Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) adalah inisiatif perdagangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada Mei 2022. IPEF bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Samudra Pasifik dan Hindia, Asia, dan Pasifik Australia. IPEF bukanlah perjanjian perdagangan bebas, tetapi kerangka kerjasama ekonomi dan pembangunan.

IPEF memiliki implikasi penting bagi Asia Tenggara, kawasan utama Indo-Pasifik. IPEF dapat membantu negara-negara Asia Tenggara mempercepat pembangunan digital, mengatasi perubahan iklim, dan memperluas kerjasama maritim (Joshua, 2022). IPEF juga dapat membantu mengubah pertumbuhan ASEAN, karena mayoritas penandatanganan ASEAN pada kerangka ini memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dan dapat memperoleh manfaat dari IPEF. IPEF juga dapat membantu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Asia Tenggara. IPEF mencita-citakan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan semua orang, termasuk mereka yang terpinggirkan atau rentan. IPEF dapat membantu mempromosikan perlindungan sosial dan mengurangi kemiskinan anak di Asia Tenggara. (Singosari, 2013)

Namun, ada juga tantangan dan kekhawatiran terkait IPEF. Beberapa ahli berpendapat bahwa IPEF terlalu kabur dan tidak memiliki langkah konkret untuk implementasinya. Yang lain mengklaim itu IPEF dapat digunakan sebagai alat untuk persaingan geopolitik dan memperparah ketegangan di kawasan. Singkatnya, IPEF berpotensi mendorong pertumbuhan, pembangunan, dan kerjasama ekonomi di Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Namun, penting untuk mengatasi tantangan dan kekhawatiran yang terkait dengan hal ini IPEF dan memastikan bahwa IPEF mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang menguntungkan semua orang di kawasan ini.

Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) adalah inisiatif ekonomi regional yang bertujuan untuk mempromosikan integrasi dan kerjasama ekonomi antar negara di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini seharusnya berimplikasi pada kebijakan keamanan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Namun informasi mengenai dampak langsung IPEF terhadap kebijakan keamanan maritim Indonesia masih terbatas. Berikut adalah beberapa temuan penelitian yang relevan: Sebuah artikel tentang ambisi QUAD di Indo-Pasifik dalam memanfaatkan ruang angkasa dan dunia siber menunjukkan bahwa meskipun Cina mencoba untuk menduduki kursi kepemimpinan global, Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik berusaha untuk bekerjasama, menemukan area fungsional yang saling menguntungkan. Kolaborasi dan redefinisi kerangka kerja keamanan. Artikel ini menganalisis perubahan geopolitik yang ada dalam hubungan internasional yang membuka jalan bagi aliansi formal dan informal dengan membandingkan kerangka kerja. Kepentingan dan motivasi negara juga dibahas SEGI di Indo-Pasifik mengacu pada gerakan

agresif Cina yang berkembang di wilayah tersebut. Artikel ini mengkaji strategi Cina di Indo-Pasifik dan manifestasinya sebagai kekuatan koersif yang memanfaatkan investasi ekonomi di ranah maritim untuk mendukung strategi pembangunannya sebagai pemimpin global. Dokumen ini kemudian mencakup dua bidang utama *Space* dan *Cyber Security* di mana tinjauan literatur menunjukkan bahwa pekerjaan yang ada saat ini tidak menyediakan bidang utama untuk kerjasama negara QUAD dan perlu ditangani (Rai, 2022)

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat jelas bahwa kawasan Indo-Pasifik menghadapi beberapa ancaman keamanan, termasuk ancaman yang terkait dengan ranah maritim. Meskipun informasi mengenai dampak langsung IPEF terhadap kebijakan keamanan maritim Indonesia masih terbatas, namun kemungkinan inisiatif ini akan berdampak pada kebijakan keamanan negara-negara di kawasan. Negara-negara di kawasan ini harus bekerjasama untuk mengidentifikasi bidang kerjasama fungsional yang saling menguntungkan dan mengatasi ancaman keamanan baru.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana pengaruh *Indo-Pacific Economic Framework* yang diprakarsai oleh Amerika terhadap strategi kebijakan maritim Indonesia di Indo-Pasifik?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Indo-Pacific Economic Framework* yang diprakarsai oleh Amerika terhadap strategi kebijakan maritim Indonesia di Indo-Pasifik.

1.4. Tinjauan Pustaka

Pertanyaan-pertanyaan yang dieksplorasi dalam artikel ini dituangkan dalam bagian tinjauan literatur, yang berisi uraian sistematis tentang hasil penelitian sebelumnya. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai publikasi yang diselaraskan dengan subjek penelitian terkini untuk mendapatkan hasil dari setiap penelitian sebelumnya. Proses ini penting untuk menghindari plagiarisme atau peniruan topik artikel yang ada. Kajian literatur yang disajikan pada bagian ini meliputi beberapa artikel, makalah, tesis, buku dan sumber lainnya yang membahas pengaruh *Indo-Pacific Economic Framework* terhadap kebijakan maritim Indonesia di Indo-Pasifik.

Berdasarkan penelitian (Montratama, 2016), kawasan Indo-Pasifik dikenal sebagai kawasan paling dinamis di abad ke-21 dengan pertumbuhan ekonomi yang melebihi kawasan lainnya. Meningkatnya kemakmuran negara-negara di kawasan itu berbarengan dengan peningkatan anggaran pertahanan, menimbulkan kesan ambisi untuk perlombaan senjata. Fenomena ini tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan di beberapa negara kawasan dalam bentuk yang berbeda-beda. Sengketa perbatasan merupakan isu paling sensitif yang dapat muncul dalam konflik bersenjata. Poin kunci yang akan membedakan penelitian yang ada dengan penelitian saat ini ditandai dengan fokus utama penelitian saat ini dimana penelitian ini akan menganalisis sudut

pandang pengaruh IPEF terhadap kebijakan maritim Indonesia di Indo-Pasifik.

Dikutip dari (Iriawan, 2018), pernyataan Donald Trump “Kamu Katakan Asia-Pasifik, Saya Katakan “Indo-Pasifik” menandakan adanya perubahan geopolitik dunia, yang menandai perubahan fundamental dalam politik global dunia. Sebagai wacana Indo-Pasifik, diperlukan perubahan mendasar dalam cara memahami dinamika politik internasional yang dulu dikenal sebagai kawasan Asia-Pasifik. Fokus utama penelitian (Iriawan, 2018) adalah transformasi geopolitik kawasan Asia-Pasifik ke kawasan Indo-Pasifik yang kemudian memengaruhi terciptanya strategi besar AS. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena akan sepenuhnya fokus pada kebijakan maritim Indonesia di Indo-Pasifik.

Riset (Pangestu, Hikmawan, & Fathum, 2021) menunjukkan bahwa sebagai kawasan baru, Indo-Pasifik telah terbentuk berdasarkan berbagai potensi yang ada. Lingkungan ini menimbulkan konflik kepentingan dari berbagai negara. Konflik antara Cina dan Amerika Serikat tidak dapat dihindari dan berdampak signifikan terhadap stabilitas kawasan. Indonesia yang terletak di tengah Indo-Pasifik menghadapi beberapa ancaman, kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan sentralitas ASEAN. Artikel ini menggunakan konsep kepentingan nasional, lingkungan strategis, Komunitas Keamanan dan diplomasi dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif (studi literatur dan wawancara) yang menggambarkan permasalahan penelitian secara empiris.

Sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh (Yanuarti, Wibisono, & Midhio, 2020) menyatakan bahwa sejak penetapan Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP) oleh Presiden AS Donald Trump pada November

2017, FOIP semakin menarik perhatian Indo-Pasifik sebagai bentuk transisi geopolitik. Pada akhirnya, FOIP dipandang sebagai langkah pertama dalam memperkuat strategi pencegahan terhadap kebangkitan Cina dan membangun kembali tatanan di wilayah tersebut. Banyak titik nyala di kawasan ini tidak dapat dihindari dan situasinya diperburuk oleh persaingan antara AS dan Cina. Indonesia sebagai pemimpin alami negara-negara kekuatan menengah tidak boleh diam dalam mengamati perubahan lingkungan strategis yang terjadi antara persaingan AS-Tiongkok, untuk merangsang konsep Indo-Pasifik sebagai geostrategi. Sementara penelitian yang ada saat ini lebih banyak membahas tentang FOIP dan sentralitas Indo-Pasifik sebagai transisi geopolitik dan geostrategi, penelitian kali ini akan memberikan analisis yang berbeda karena berfokus pada kawasan Indo-pasifik sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada perspektif regional Indonesia.

Jurnal berjudul *“China Versus the United States: Interpretation of Superpower Security Rivalry in the Asia Pacific Region”* yang ditulis oleh (Syahrin, 2018) bertujuan untuk menemukan isu kebijakan keamanan terkini antara kekuatan besar Amerika Serikat dan Cina di kawasan Asia- wilayah Pasifik. Dengan berkembangnya Tiongkok, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi penting bagi stabilitas dan keamanan kawasan Asia-Pasifik. Konflik keamanan kedua negara merupakan bentuk “tradisi lama” yang kini diulangi oleh “organisasi baru”. Persaingan politik dan keamanan yang memuncak seiring dengan berakhirnya Perang Dingin tidak menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya entitas yang memiliki kemampuan untuk terus mendominasi situasi politik dunia.

Dalam makalah berjudul “Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Pasifik

2014-2017” yang ditulis oleh (Waskito, 2018), tujuan penelitian adalah menganalisis dampak Jepang dalam menjalankan prinsip pasifisme, alih-alih membangun kapabilitas militer dalam berbagai bentuk, dan menggambarkan kekuatan militer negara-negara di kawasan Asia-Pasifik seperti Cina, Korea Utara, dan India. (Waskito, 2018) menggunakan teori realisme klasik yang berfokus pada bagaimana kondisi internasional yang anarkis dapat mempengaruhi suatu negara untuk mengembangkan kemampuan militernya sendiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam memprediksi penggunaan kemampuan militer suatu negara. Penelitian ini akan berbeda dari segi teori, karena penulis menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri dari William D. Coplin dan Konsep Geopolitik

Penelitian dari (Yadav, 2020) menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri India terhadap sentralitas ASEAN didasarkan pada identitas dan kepentingan nasionalnya. Mengadopsi konstruktivisme melalui metode sejarah komparatif, tesis ini menyimpulkan bahwa kepentingan nasional India saat ini adalah realisasi dari perjalanan panjang beberapa hubungan masa lalu dalam lingkup sosial-budaya, agama, politik, ekonomi dan kontak komersial era tradisional di kawasan Indo-Pasifik. Peran India secara alami dilihat sebagai "pusat utama" pengaruh ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Selain itu, diperdebatkan bahwa penemuan kembali kepentingan nasional India pada dasarnya terkait dengan perolehan identitas baru sebagai "hub pertama" di kawasan Indo-Pasifik. Analisis konseptual dari kebijakan "Lihat ke Timur" dan kemudian "Tanggapi Timur" menunjukkan bahwa strategi ini mewujudkan kepentingan nasional utama India, yang secara tidak langsung bertujuan untuk mempertahankan peran India sebagai "kekuatan besar" yang menghubungkan negara-negara Afrika dan

Teluk, serta Asia Timur dan Asia Tenggara. Penelitian kali ini berbeda karena berfokus pada kebijakan maritim Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya sebaliknya, berfokus pada identitas nasional dan kepentingan nasional India.

Di sisi lain, penelitian (Yunanto & Samhudi, 2019) berjudul; “Kepentingan Berbeda Menjelaskan Proposal Berbeda: Kontestasi Kerangka Kerjasama Indo-Pasifik antara ASEAN dan AS” memaparkan bahwa kebangkitan Cina, sejalan dengan pergeseran strategis di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik, baru-baru ini telah memulai tahap baru kontestasi kekuatan besar. ASEAN yang menjadi tuan rumah negara-negara Asia Tenggara memiliki sikap tertentu untuk menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh persaingan. Sementara itu, Pemerintah AS dengan kepentingan globalnya tidak akan pernah membiarkan kawasan itu jatuh di bawah pengaruh Cina. Secara bersamaan, baik ASEAN maupun AS memiliki pendekatan yang sama dalam situasi ini untuk menggunakan kerangka kerjasama Indo-Pasifik yang secara definitif terbuka untuk penjelasan apa pun untuk mendapatkan manfaat yang dihasilkan dari interaksi global di kawasan. Namun, persepsi mereka dalam mendefinisikan kerangka kerjasama Indo-Pasifik beragam. Oleh karena itu, (Yunanto & Samhudi, 2019) mencoba menganalisis dasar pemikiran ASEAN dan AS dalam mengembangkan konsep kerjasama Indo-Pasifik berdasarkan penilaian strategis masing-masing. Makalah ini berpendapat bahwa perbedaan kepentingan dan wawasan ancaman ASEAN dan AS terhadap kebangkitan Cina dan kontestasi kekuatan besar di kawasan adalah dua faktor utama perbedaan persepsi mereka tentang konsep kerangka kerjasama Indo-Pasifik. Sementara penelitian di atas berfokus pada penjelasan persepsi ASEAN dan AS terhadap kerangka kerjasama

Indo-Pasifik, penelitian ini difokuskan pada analisis dampak IPEF terhadap kebijakan maritim Indonesia di Indo-Pasifik.

Dikutip dari jurnal (Perwita & Tertia, 2018) berjudul; “Kerjasama Keamanan Maritim India-Jepang di Indo-Pasifik: Menciptakan Perhubungan Kekuatan Maritim dalam Menyeimbangkan Tiongkok (2012-2017)”, ini menunjukkan bahwa pada abad ke-21, lanskap keamanan di Indo-Pasifik berubah dengan cepat, sebagian besar disebabkan oleh perluasan Angkatan Laut Cina dan melemahnya pengaruh AS di wilayah tersebut. Menanggapi situasi ini, India dan Jepang sebagai kekuatan regional sepakat untuk bekerjasama. Berdasarkan pidato Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2007, baik India dan Jepang memiliki kesamaan dalam keamanan maritim. Sejak Perdana Menteri Shinzo Abe kembali berkuasa pada tahun 2012, Jepang memperluas cakupan keamanannya dengan memandang India sebagai mitra keamanan. Sementara itu, kebijakan “*Act East*” India mengambil peran yang lebih aktif di Timur, terutama di Jepang. Selanjutnya, Jepang kemudian mengkoordinasikan kebijakan strategisnya untuk meningkatkan kerjasama maritim. Artikel ini memaparkan implementasi kerjasama angkatan laut India dan Jepang sebagai penyeimbang Cina di Indo-Pasifik. Artikel ini sangat berbeda dengan publikasi yang ada, karena berfokus pada kebijakan maritim Indonesia di Indo-Pasifik.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1 Teori Kebijakan Luar Negeri

Menurut William D. Coplin dalam teori pengambilan keputusan dan kebijaksanaan politik luar negeri memiliki tiga faktor yang determinan yaitu: kondisi

politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer dan konteks internasional (Coplin, 1992)

1. Situasi politik dalam negeri, bahwa politik dalam negeri hanyalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri negara-negara. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu, bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor-faktor lain juga bisa bekerja didalamnya, seperti faktor budaya yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Amerika merupakan Negara yang berusaha untuk menjaga keamanan dan menciptakan perdamaian dengan asas kebebasan yang akan menciptakan kemakmuran atau yang bisa kita katakana sebagai slogan "*peace and prosperity*" inilah yang memunculkan istilah "*American Internasionalism*" yaitu dengan mengkombinasikan realis dan liberalis, hal inilah yang semakin menguatkan hegemoni AS di dunia.
2. Situasi ekonomi dan militer domestik, yakni suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya. Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.
3. Konteks internasional, geografis, ekonomis dan politis merupakan tiga elemen penting dalam membahas dampak internasional terhadap politik luar negeri suatu Negara. Dalam lingkungan internasional setiap Negara

memiliki lokasi atas daerah yang dikuasainya, dalam kaitannya dengan Negara-negara lain dalam sistem dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik Negara itu dengan Negara-negara yang lainnya.

1.5.2 Konsep Geopolitik

Geopolitik adalah konsep tentang hubungan antara faktor geografis dan politik kontemporer. Ini memiliki dasar yang sangat materialistis dan objektif, karena berfokus pada faktor geografis. Namun, kerangka geopolitik juga didasarkan pada konstruksi sosial. Geopolitik bukan hanya studi tentang urusan negara dan manajemen internasional, tetapi juga risalah tentang hubungan antara pengetahuan, kekuasaan dan hubungan sosial dan politik dalam interaksi geografi, pengetahuan dan institusi politik dan sosial (Saputra & Sudirman, 2020).

Dalam konteks hubungan internasional, geopolitik sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antar negara dan kepentingan strategisnya. Geopolitik dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan antara negara maju dan berkembang, terutama dalam hal geopolitik, sosial budaya, dan ekonomi. Misalnya, negara maju memiliki kualitas hidup dan tingkat pendapatan yang tinggi, sedangkan negara berkembang sebaliknya. Dari segi geopolitik, negara maju dan negara berkembang memiliki sistem atau regulasi politik yang berbeda dalam bentuk aspirasi dan strategi geografis nasional. Dari segi sosial budaya, perbedaan antara negara maju dan negara berkembang terletak pada perkembangan teknologi, dengan

negara maju menjadi contoh bagi negara berkembang (Rahmat, 2021)

Geopolitik juga dapat digunakan untuk menganalisis dinamika diplomasi ruang angkasa di kawasan Indo-Pasifik. Situasi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik dipengaruhi oleh kerjasama dan persaingan antara Cina, Jepang, dan India di bidang antariksa. Indonesia yang berada di tengah zona geopolitik ini dan memiliki kepentingan spasial nasional berada dalam situasi yang menguntungkan sekaligus sulit (Alfathimy, et al., 2021). Indonesia menggunakan konsep tersebut *pragmatic equidistance* dan *space diplomacy* mendorong terciptanya ekosistem kawasan yang lebih baik, dan bukan arena konflik kepentingan, seperti yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik (Saputra & Sudirman, 2020)

Selain itu, geopolitik juga dapat digunakan untuk menganalisis akibat dari kegiatan bisnis internasional di Indonesia. Aspek geografis dalam geopolitik menyangkut geografi wilayah suatu negara, yang melibatkan sumber daya alam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini memastikan bahwa setiap negara harus bersaing untuk menaklukkan pasar global menggunakan geostrategi. Kawasan Pasifik telah menciptakan kawasan ekonomi dan politiknya sendiri dengan Jepang dan Amerika Serikat sebagai negara acuan untuk ekonomi global. Indonesia sebagai negara kepulauan di garis khatulistiwa memiliki kekayaan ekonomi yang melimpah berupa berbagai sumber daya alam. Secara geografis, geostrategi Indonesia untuk

memasuki persaingan pasar akan berbeda dengan negara lain (Annisa & Najicha, 2021).

Kepentingan Ekonomi: Kawasan Indo-Pasifik adalah rumah bagi beberapa ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan merupakan sumber daya dan pasar vital bagi banyak negara. Akibatnya, negara-negara besar bersaing untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan pasar ini, dan mempengaruhi kebijakan ekonomi regional.

Kepentingan Strategis: Kawasan Indo-Pasifik juga penting secara strategis karena merupakan rumah bagi beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia dan pangkalan militer utama. Akibatnya, negara-negara besar bersaing untuk menguasai aset-aset strategis ini dan mempengaruhi kebijakan keamanan regional.

Pengaruh Politik: Negara-negara besar juga bersaing untuk mendapatkan pengaruh politik di kawasan Indo-Pasifik saat mereka berupaya membentuk lanskap politik kawasan itu dan memajukan kepentingan mereka sendiri. Ini termasuk mendukung pemerintah yang ramah, mempromosikan nilai-nilai politik mereka sendiri, dan menolak pengaruh kekuatan saingan.

Geopolitik kawasan Indo-Pasifik dipengaruhi oleh negara-negara besar seperti India, Cina, dan Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah strategi maritim Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama maritim dengan India sebagai *cover strategy* untuk menghadapi persaingan antara kedua negara adidaya tersebut. Strategi ini juga sejalan dengan ambisi Indonesia

untuk berkembang *sea power* termasuk *chokepoint* (Kurniawan & Puspitasari, 2017). Contoh ini menunjukkan bagaimana tindakan dan strategi kekuatan besar dapat berdampak signifikan pada geopolitik kawasan Indo-Pasifik.

Singkatnya, geopolitik adalah konsep yang berhubungan dengan hubungan antara faktor geografis dan politik kontemporer. Dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan antara negara maju dan negara berkembang, dinamika diplomasi antariksa, dan dampak kegiatan bisnis internasional di Indonesia.

Geopolitik dapat berdampak pada eskalasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik, khususnya bagi negara-negara berkembang. Berikut adalah beberapa poin yang relevan dari temuan penelitian tersebut: Meningkatnya ketegangan dan potensi konflik di kawasan Indo-Pasifik akibat kemunculan Cina sebagai pemain global yang mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia (Delanova & Yani, 2022), kekuatan yang semakin besar yang dijadikan energi oleh Cina keamanan menjadi prioritas, isu krusial, dan perusahaan *National Oil Company* (NOC) memainkan peran penting dalam pendekatan kapitalisme negara untuk mencapai ketahanan energi (Asban, 2018), penolakan keanggotaan Cina dalam *International Space Station* (ISS) oleh Amerika Serikat karena persaingan keamanan luar angkasa, dimana Amerika Serikat ingin menghalangi program luar angkasa Tiongkok dan mempertahankan posisi terdepannya di luar angkasa (Sari, 2017), diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Australia telah berhasil,

khususnya di domain maritim, dan membutuhkan upaya pemerintah yang berkelanjutan untuk mengembangkan strategi diplomasi pertahanan (Pramitha, 2017)

Ringkasnya, isu-isu geopolitik seperti kompetisi untuk ketahanan energi, program luar angkasa, dan kepentingan kekuatan besar dapat mempengaruhi eskalasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik, termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif. Menurut (Creswell, 2014) kualitatif adalah pendekatan penelitian yang prosesnya terletak pada teks dan juga gambar dalam menginterpretasikan data yang telah didapat membutuhkan sebuah peneliti yang telah memahami subjek. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan dimana berasal dari berbagai sumber, seperti memperoleh data yang diinginkan melalui studi dokumentasi dan jejak digital.

Untuk mendapatkan data yang valid dari sumber data, maka perlu menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data (Sugiyono, 2010). Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah studi literatur (*library research*), peneliti mengumpulkan data dengan cara mengkaji literatur berupa buku, jurnal, artikel, dokumen, halaman atau website resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1.7. Hipotesis

Dengan adanya IPEF yang diprakarsai oleh Amerika Serikat berkontribusi terhadap perubahan kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya kebijakan luar negeri di kawasan Indo-Pasifik. IPEF membuat hubungan keamanan maritim di Indo-Pasifik semakin bergolak karena Amerika melalui IPEF berusaha untuk melawan pengaruh China sehingga menimbulkan persaingan di kawasan Indo-Pasifik dan hal inilah yang membuat Indonesia meningkatkan kekuatan militer maritimnya.

1.8. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam proposal tesis ini akan dibagi dan dijelaskan ke dalam lima bab yaitu:

BAB I: Bab ini menjelaskan beberapa sub-bab sebagai berikut; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini membahas perdamaian dan stabilitas kawasan di Asia Tenggara dan keterkaitan IPEF dengan stabilitas wilayah di Asia Tenggara dan upaya yang dilakukan ASEAN untuk mencapai stabilitas di kawasan indo-pasifik.

BAB III: Bab ini menjelaskan geopolitik dan implementasi politik luar negeri Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dan upaya konkrit untuk meningkatkan keamanan maritim di kawasan indo-pasifik.

BAB IV: Bab ini berisi kesimpulan.